

PENUTUP

BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis dapat setelah melakukan wawancara dan menganalisa data-data yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kegiatan usaha *Barber Shop* merupakan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh dinas BPMP2T yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Padang, dengan melakukan dua cara yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal, penertiban terhadap kegiatan usaha ini dapat dilakukan oleh dinas Satpol PP secara langsung tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu dengan dinas BPMP2T dengan adanya laporan atau keluhan dari masyarakat. Dari data yang penulis dapat dilapangan, BPMP2T Kota Padang dalam melakukan pengelola izin gangguan menemui kendala dalam memproses dan mengelola izin gangguan tersebut, seperti tidak termasuknya kegiatan usaha *Barber Shop* kedalam Objek gangguan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan. Serta belum diberlakukannya secara efektif peraturan daerah tersebut dilapangan oleh dinas BPMP2T Kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha *Barber Shop* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Kendala hukum

Pertama, tidak adanya aturan yang jelas didalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011 tersebut karna tidak dimasukan jenis usaha tersebut kedalam salah satu Objek Gangguannya. Kedua kendala dari aparat penegak hukum yang dimana kurangnya kordinasi antar lembaga yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha *Barber Shop*. Ketiga, tidak adanya

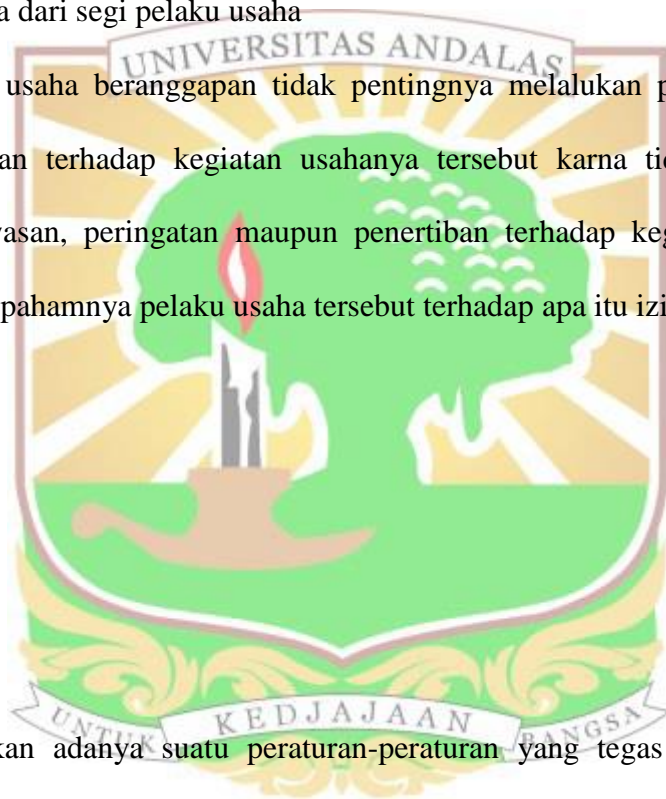
penindakan maupun sanksi terhadap kegiatan usaha tersebut yang jelas tidak memiliki izin gangguan ini, sehingga pelaku usaha cenderung untuk menyepelekan masalah perizinan tersebut.

b. Kendala dari segi masyarakat

Kurang acuhnya masyarakat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan disekitar tempat tinggalnya, untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut

c. Kendala dari segi pelaku usaha

Pelaku usaha beranggapan tidak pentingnya melalukan pengurusan surat izin gangguan terhadap kegiatan usahanya tersebut karna tidak adanya tindakan pengawasan, peringatan maupun penertiban terhadap kegiatan usahanya, dan kurang pahamnya pelaku usaha tersebut terhadap apa itu izin gangguan.



B. Saran

1. Diharapkan adanya suatu peraturan-peraturan yang tegas dan jelas mengenai kegiatan usaha *Barber Shop* di Kota Padang. Untuk mendasari dinas terkait dalam melakukan kepengurusan izin maupun pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan usaha *Barber Shop* ini. Selain itu di harapkan juga ada sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan agar tercipta efek jera dan tertib hukum.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat memberikan sosialisasi terhadap pentingnya perizinan, demi terciptanya masyarakat yang taat hukum.

3. Diharapkan adanya koordinasi yang jelas antara Dinas BPMP2T dan Dinas Satpol PP Kota Padang dalam melakukan fungsi pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha *Barber Shop* tersebut.
4. Diharapkan Pemerintah Kota Padang melakukan pembinaan terhadap masyarakat umum akan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu penegakan Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011.

